

**SILABUS DARURAT PARUH KEDUA SEMESTER GANJIL  
PEMETAAN POKOK BAHASAN/ MATERI ESSENSIAL DAN PERTEMUAN  
MTs. NURUL FALAH  
TAHUN PELAJARAN 2020/ 2021**

Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan  
Kelas/ Semester : VIII/I

| NO.  | KOMPETENSI DASAR   | PERTEMUAN | POKOK BAHASAN/ MATERI   |
|------|--|-----------|---|
| 3.3. | Memahami tata urutan peraturan perundangan-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia | 10        | Memaknai peraturan perundang-undangan   |
|      |  | 11        | Pengertian peraturan perundang-undangan nasional                              |
|      |  | 12        | Tata urutan peraturan perundang-undangan                                      |
|      |  | 13        | Proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UUD NRI 1945)                 |
|      |  | 14        | Ketetapan MPR terhadap penyusunan Peraturan Perundang-undangan (UUD NRI 1945) |
|      |  | 15        | Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang                |
|      |  | 16        | Peraturan daerah dan proses penyusunan berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011     |
|      |  | 17        | Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan                  |

Mengetahui,  
Kepala MTs. Nurul Falah

**Andri Maulana, S.Pd.I**

Gunungsindur, Oktober 2020

Guru Mata Pelajaran

**Asep Jamaludin, S.Sos**

## RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Nama Madrasah : **MTs. NURUL FALAH**  
 Tahun Pelajaran : 2020/ 2021  
 Mata Pelajaran : PKn  
 Kelas/ Semester : VIII/I  
 Materi : Memaknai peraturan perundang-undangan  
 Alokasi Waktu : 2 Jam

| <b>TUJUAN PEMBELAJARAN</b>  |  |  |              |
|---|--|--|--------------|
| Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat:   |  |  |              |
| 1) Mendeskripsikan makna peraturan perundang-undangan<br>2) Mengidentifikasi makna peraturan perundang-undangan<br>3) |  |  |              |
| <b>KEGIATAN PEMBELAJARAN</b>  |  |  |              |
| Kegiatan Pendahuluan  | 1. Membuka kelas melalui grup whatsapp, memberi instruksi agar siswa berdo'a terlebih dahulu sebelum pelajaran dimulai.<br>2. Menyampaikan tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran dan aspek-aspek yang dinilai |  |              |
| Kegiatan Inti   | Pertemuan 10   | 1. Peserta didik menyimak dan menyimpulkan materi tentang Memaknai peraturan perundang-undangan melalui ringkasan materi maupun link video penjelsan yang terdapat pada form latihan (google form)<br>2. Peserta didik menyimak penyampaian materi melalui google form dalam bentuk ringkasan materi dan soal pilihan ganda maupun essay tentang Memaknai peraturan perundang-undangan.<br>3. Peserta didik dan guru berdiskusi melalui grup whatsapp<br>4. Peserta didik menuliskan kesimpulan materi yang telah dibaca dan difahami dalam ringkasan materi yang terdapat di google form lalu mengerjakan soal yang tersedia baik dalam bentuk pilihan ganda maupun essay |              |
|   | Pertemuan 11   | •  |              |
|   | Pertemuan 12   | •  |              |
|   | Pertemuan 13   | •  |              |
|   | Pertemuan 14   | •  |              |
| Refleksi dan Konfirmasi   | •  |  |              |
| <b>PENILAIAN</b>  |  |  |              |
| SIKAP SPIRITUAL   | SIKAP SOSIAL   | PENGETAHUAN  | KETERAMPILAN |
|   |  |  |              |

Mengetahui,  
Kepala MTs. Nurul Falah

**Andri Maulana, S.Pd.I**

Bogor, .... Oktober 2020

Guru Mata Pelajaran

**Asep Jamaludin, S.Sos**

**BAHAN AJAR**  
**PEMBELAJARAN JARAK JAUH**  
**MTs. NURUL FALAH**  
**TAHUN PELAJARAN 2020/ 2021**

Mata Pelajaran : PKn  
Kelas/ Semester : VIII/I  
Materi : Memaknai peraturan perundang-undangan  
Pertemuan Ke : 10

**I. KOMPETENSI DASAR**

1. Memahami tata urutan peraturan perundangan-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia

**II. MATERI PEMBELAJARAN**

Pokok Bahasan : Memaknai peraturan perundang-undangan  
Ringkasan Materi : Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional

**III. MEDIA PEMBELAJARAN**

Google form : <https://docs.google.com/forms/d/118BVPasFRSg1UNsPEhXysnq-k22Phr3foUECoCLIOwY/edit?usp=sharing>

**Ringkasan materi**

**Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional**

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) "*Negara Indonesia adalah negara hukum.*". Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintah harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, pasal 22A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang - undang diatur dengan undang - undang." Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A tersebut, ditetapkanlah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Hukum memiliki berbagai bentuk hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Hukum tertulis dalam kehidupan saat ini memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kepastian hukum. Meskipun demikian, hukum tidak tertulis tetap diketahui keberadaannya sebagai salah satu hukum yang mengikat masyarakat.

**IV. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN (SKENARIO PEMBELAJARAN)**

Kegiatan Inti :

1. Peserta didik menyimak Penyampaian materi tentang Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional via whatsapp grup belajar, google form dan media lain yang relevan dengan materi (slide maupun tayangan video).
2. Peserta didik menyimak : penyampaian materi melalui pemaparan materi tentang Pengertian Peraturan Perundang-undangan Nasional melalui whatsapp grup belajar, google form dan media lain yang relevan dengan materi (slide maupun tayangan video)
3. Peserta didik dan guru berdiskusi melalui grup whatsapp
4. Peserta didik mengerjakan tugas yang tersedia pada google form tentang materi whatsapp grup belajar, google form dan media lain yang relevan dengan materi (slide maupun tayangan video)
5. Peserta didik mengerjakan soal dalam bentuk pilihan ganda maupun uraian yang tersedia dalam google form

**V. ALAT EVALUASI**

**A. PILIHAN GANDA**

1. Pada pembukaan UUD 1945 berisi tentang .....

  - a. Berisi tentang agama yang dianut rakyat indonesia
  - b. Berisi tentang kewajiban pemerintah terhadap rakyat
  - c. Berisi tentang latar belakang kemerdekaan bangsa
  - d. Berisi tentang sikap keadilan negara kepada rakyatnya

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 berisi tentang .....
  - a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
  - b. Pembentukan Peraturan kehidupan manusia
  - c. Pembentukan Peraturan kehidupan beragama
  - d. Pembentukan Peraturan kehidupan sosial
3. “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang - undang diatur dengan undang – undang”, merupakan bunyi pada UUD 1945 pasal ....
  - a. Pasal 22A
  - b. pasal 22C
  - c. Pasal 23A
  - d. Pasal 21A
4. Bunyi pasal 1 ayat (3) pada UUD 1945 adalah .....
  - a. Negara Indonesia adalah negara demokrasi
  - b. Negara Indonesia adalah negara hukum
  - c. Negara Indonesia adalah negara beragama
  - d. Negara Indonesia adalah negara berbudaya
5. UUD 1945 memiliki sifat universal, universal dalam hal ini mengandung arti .....
  - a. Diterima oleh segenap rakyat indonesia
  - b. Negara terbagi pada beberapa pulau
  - c. Diterima oleh bangsa-bangsa didunia
  - d. Diterima sebagai pedoman kehidupan berbangsa
6. Pembukaan UUD 1945 mengandung nilai lestari, yang dimaksud mengandung nilai lestari adalah ....
  - a. Mampu menampung kekayaan negara
  - b. Mampu menampung segenap SDM yang dimiliki negara
  - c. Mampu menampung dinamika masyarakat
  - d. Mampu menampung seluruh aspirasi warga
7. Pembukaan UUD 1945 terdiri dari ..... alinea
  - a. 4
  - b. 5
  - c. 3
  - d. 2
8. Pada pembukaan UUD 1945 alinea pertama mengandung nilai objektif, maksud dari nilai objektif tersebut adalah .....
  - a. Aspirasi warga untuk mendapatkan hak akses jalan yang memadai
  - b. Aspirasi warga untuk memperoleh penghidupan yang layak
  - c. Aspirasi bangsa indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan
  - d. A dan B benar
9. Berikut ini yang merupakan salah satu prinsip-prinsip yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 adalah ....
  - a. Negara memiliki sistem pemerintahan monarki absolut
  - b. Negara berbentuk kerajaan
  - c. Negara berbentuk kesultanan
  - d. Negara berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat
10. Pembukaan UUD 1945 ditetapkan pada tanggal .....
  - a. 17 agustus 1945
  - b. 18 Agustus 1945
  - c. 17 Agustus 1980
  - d. 1 Oktober 2020

B. KUNCI JAWABAN

1. C
2. A
3. A.
4. B
5. C
6. C
7. A
8. C
9. D
10. B

Mengetahui,  
Kepala MTs. Nurul Falah

Bogor, .... Oktober 2020  
Guru Mata Pelajaran

**Andri Maulana, S.Pd.I**

**Asep Jamaludin, S.Sos**